

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jalan adalah prasarana infrastruktur dasar yang paling dibutuhkan manusia guna dapat melakukan pergerakan dari suatu tempat menuju tempat lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap sangat mendesak apabila kegiatan ekonomi masyarakat mengalami suatu pertumbuhan yang cukup signifikan (Abidin 2019).

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Barat dengan posisi geografis yang terletak di antara  $0^{\circ}55'00''$  –  $3^{\circ}21'00''$  Lintang Selatan dan  $98^{\circ}35'00''$  –  $100^{\circ}32'00''$  Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar  $\pm 6.011,35$  km<sup>2</sup> dan garis pantai sepanjang  $\pm 1.402,66$  km. Secara geografis, daratan Kabupaten Kepulauan Mentawai ini terpisahkan dari Provinsi Sumatera Barat oleh laut, yaitu dengan batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia (Sumari, Nugroho, and Addin 2016).

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 kawasan Kepulauan Mentawai memiliki panjang jalan  $\pm 1127,40$  km dengan kondisi jalan mantap untuk Jalan Nasional 22,3 km, Jalan mantap di Provinsi 6,1 km dan jalan mantap di Kabupaten 92,31 km dengan persentase jalan mantap yang tersedia di Kepulauan Mentawai kurang lebih hanya sekitaran 10%, sehingga untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Mentawai menjadi sasaran utama bagi pemerintah daerah setempat .

Dalam pembangunan infrastruktur jalan tersebut pemerintah daerah tiap tahunnya selalu menggunakan anggaran dana yang lebih dominan di infrastruktur jalan, dan sistem pendanaan yang diadakan kebanyakan merupakan pendanaan dengan sistem tahun tunggal. Pendanaan tahun tunggal diartikan sebagai kegiatan proyek dimana masa pelaksanaan pekerjaannya sesuai atau sama dengan satu tahun anggaran. Pelaksanaan

pembangunan jalan di Kepulauan Mentawai pun kebanyakan hanya pekerjaan peningkatan jalan atau pembukaan lahan (*Land Clearing*) dimana panjang jalan yang dapat dikerjakan menurut Data LPSE Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya berkisar kurang lebih 2-3 km per masing-masing proyek dengan durasi pengerjaan 8-9 bulan apabila menggunakan sistem pendanaan tahun tunggal.

Pembangunan infrastruktur jalan dengan sistem pendanaan tahun tunggal di Kepulauan Mentawai pastinya tidak akan terlepas dari namanya risiko proyek, dimana lokasi Kepulauan Mentawai merupakan daerah terpencil dan daerah kepulauan sehingga susah sistem pengadaan material dimana kebanyakan bahkan hampir seluruh material didatangkan dari luar Kepulauan Mentawai, sistem pengelolaan sumber daya manusia yang harus didatangkan dari luar Kepulauan Mentawai dikarenakan kurangnya pengetahuan sumber daya manusia setempat tentang pengerjaan proyek infrastruktur jalan, pembebasan lahan dari kaum masyarakat setempat, bencana alam dan faktor cuaca di Kepulauan Mentawai yang dapat menghambat pengerjaan proyek, mobilisasi alat berat dan termasuk perizinan saat memobilisasi alat berat dan hal-hal lainnya yang mungkin akan berdampak terhadap *delay*-nya suatu proyek dan *loose budget* dari proyek tersebut (Fitri, Yulia dkk 2016). Problema yang muncul dari masyarakat yaitu kesulitannya mendapatkan jalan mantap yang dikarenakan penggunaan anggaran sistem tahun tunggal hanya bisa melakukan peningkatan jalan kurang lebih hanya 2-3 km saja, dan belum tentu tahun berikutnya akan dilanjutkan pada daerah yang dilakukan peningkatan jalan pada tahun sebelumnya, biasanya tahun yang akan datang peningkatan jalan akan dilakukan pada daerah lain yang belum dilakukan peningkatan jalan pada tahun sebelumnya.

Dalam hal ini sangatlah penting diadakan analisis risiko terhadap pembangunan infrastruktur jalan tersebut dengan sistem pendanaan tahun tunggal di Kepulauan Mentawai, guna mengetahui dan mengatasi risiko yang akan terjadinya dengan cara mengamati secara serius apakah sistem pendanaan tahun tunggal untuk pembangunan infrastruktur jalan ini layak

digunakan di Kepulauan Mentawai, sehingga proyek di Kepulauan Mentawai dapat terlaksana dengan efektif sesuai dengan anggaran biaya, waktu, kualitas dan keselamatan.

## 1.2 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini bertujuan untuk :

- Membuat manajemen risiko pada pembangunan jalan dengan sistem pendanaan tahun tunggal di Kepulauan Mentawai

Manfaat dari penelitian ini agar Pengguna Jasa di Kepulauan Mentawai dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk melihat seberapa tingkat risiko pembangunan infrastruktur jalan dengan sistem pendanaan tunggal di Kepulauan Mentawai dan seberapa layak nya penggunaan sistem pendanaan tahun tunggal ini untuk pembangunan Infrastruktur jalan di Kepulauan Mentawai agar dapat ditindak lanjuti ataupun dapat diperlakukan secara khusus.

## 1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar lebih terarah nya serta mempermudah pembahasan topik masalah sehingga tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, adapun batasan masalah dari penelitian ini antara lain :

- Pengambilan sampel penelitian ini berdasarkan proyek tahun 2019 sampai dengan proyek tahun 2021 dikarenakan koresponden yang dibutuhkan masih berada di kawasan Mentawai
- Pada penelitian ini proyek infrastruktur yang diambil hanya proyek infrastruktur perkerasan kaku dikarenakan aspal tidak tersedia di Mentawai.
- Kawasan Mentawai yang diteliti adalah di Pulau Sipora